

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata di era globalisasi seperti ini sudah tidak lagi menjadi hal tabu bagi setiap orang, apalagi bagi orang yang mengunjunginya atau biasa disebut dengan wisatawan. Wisatawan membutuhkan pelayanan yang baik, sedangkan masyarakat sekitar lokasi wisata berharap akan mendapatkan hal positif berupa peningkatan pendapatan, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Fenomena ini sekarang harus menjadi perhatian pemerintah daerah Banjarnegara yang memiliki banyak potensi wisata salah satunya adalah wisata sungai Serayu.

Sungai Serayu merupakan salah satu sungai yang melintasi beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara dan bermuara pada samudera Hindia yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Sungai Serayu ini juga berandil besar dalam pembuatan bendungan Jenderal Sudirman yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dengan lebar sungai sekira 12-25 m, arung jeram di sungai Serayu masuk dalam kategorigrade III-IV. Tantangan dan keseruan yang ditawarkan sungai inipun dilengkapi pemandangan alam yang mengagumkan di kiri-kanan sungai.

Dulu, sungai Serayu hanya dimanfaatkan sebagai sumber pengairan di daerah sekitarnya seperti pembentukan bendungan, pengairan sawah, dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini khususnya sungai Serayu tidak hanya

dimanfaatkan sebagai sumber pengairan semata melainkan menjadi tempat wisata yang menarik bagi para wisatawan.

Tahun 1997, sungai Serayu pernah menjadi tempat lomba arung jeram tingkat nasional. Dimana banyak peserta dari berbagai daerah bahkan luar negeri yang mengikuti perlombaan tersebut. Inilah awal mula sungai dengan medan yang unik dan menantang tersebut dikenal luas sampai ke manca negara. Hal yang menjadi nilai tambah dan keunikan sungai ini adalah debit airnya tidak terpengaruh musim hujan. Jadi sungai Serayu dapat menjadi wahana arung jeram sepanjang tahun, tidak hanya wisatawan lokal yang tertarik tetapi juga bagi wisatawan asing.

Para wisatawan bisa menikmati arung jeram dimulai dari Desa Tunggara, Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, dan berakhir di Desa Singomerto, Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Desa Singomerto selain dijadikan sebagai desa pemberhentian wisata arung jeram. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sudah memberikan fasilitas tambahan bagi para wisatawan baik domestik maupun asing yang menikmati wisata arung jeram seperti dengan restaurant keluarga, terapi ikan, dan pemandangan alam yang sangat indah sehingga para wisatawan setelah selesai melakukan arung jeram tidak langsung meninggalkan tempat wisata tersebut.

Dengan adanya wisata sungai Serayu dan menambahkan fasilitas wisata di Desa Singomerto, maka pemerintah daerah harus berperan dalam mengembangkannya yaitu dengan memberdayakan masyarakat Desa Singomerto karena dengan adanya peran masyarakat desa dalam

pengembangan pariwisata maka akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Wisata sungai Serayu tidak hanya semata-mata dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi ada campur tangan pihak swasta dalam pengelolaannya. Pihak swasta disini hanya sebagai pembantu pemerintah daerah, karena pihak swasta hanya menambahkan pelengkap dari wisata arung jeramnya yaitu restaurant keluarga bagi para wisatawan.

Tetapi dalam proses pengembangan wisata sungai Serayu tidak semudah yang dipikirkan, karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat desa. Antara lain kurangnya transportasi yang memadai, akses jalan yang kurang memadai, kurangnya fasilitas penginapan bagi wisatawan, kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang pariwisata, komunikasi masyarakat desa dengan wisatawan baik dalam penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing.

Transportasi di Banjarnegara masih kurang memadai, karena perjalanan menuju Kabupaten Banjarnegara hanya bisa ditempuh melalui jalur darat. Angkutan bis antarkota yang melewati Banjarnegara antara lain adalah jurusan Solo – Bawen – Wonosobo - Purwokerto, Semarang – Bawen – Wonosobo - Purwokerto, Wonosobo – Banjarnegara - Bandung, Wonosobo – Banjarnegara - Banyumas serta Banjarnegara - Jakarta.

Alternatif lain adalah menggunakan jasa angkutan travel yang antara lain dilayani adalah:

- Jakarta - Purwokerto - Banjarnegara - Wonosobo
- Bandung - Purwokerto - Banjarnegara - Wonosobo
- Purwokerto - Banjarnegara - Semarang
- Purwokerto - Banjarnegara - Yogyakarta
- Purwokerto - Banjarnegara - Semarang – Surabaya

Alternatif angkutan di dalam kota Banjarnegara termasuk angkutan menuju desa Singomerto adalah menggunakan angkutan kota (angkot), becak, dan dokar dengan waktu operasional yang sangat terbatas sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Untuk fasilitas penginapan di Banjarnegara hanya ada beberapa hotel, antara lain :

- Hotel Central Banjarnegara
- Hotel Surya Yudha
- Hotel Garuda Banjarnegara
- Hotel Asri Banjarnegara
- Hotel Sokanandi Banjarnegara¹

Hotel-hotel tersebut juga terletak di pusat kota Banjarnegara, yang jaraknya cukup jauh dari Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Permasalahan seperti ini memang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat desa yang sangat dekat dengan wisatawan saat mengunjungi wisata sungai Serayu, maka pemerintah daerah harus segera mengatasi kendala-kendala yang dihadapi agar pengembangan wisata sungai Serayu semakin menarik para wisatawan.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara diakses pada tanggal 14 Mei 2016

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan tidak hanya untuk menarik wisatawan tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumberdaya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alamnya yang bisa dibanggakan dari kabupaten Banjarnegara.

Dari penjabaran latar belakang masalah, maka saya mengambil judul tentang “Peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata sungai Serayu (studi kasus : Pemberdayaan Masyarakat desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. “Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata sungai Serayu?”.
2. “Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat?”.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wisata sungai Serayu.

- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata sungai Serayu.

2. Manfaat

a. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat desa dalam proses pengembangan sektor wisata.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat desa dalam pengembangan wisata yang ada di sekitarnya.
- 3) Memberikan pengetahuan bagi pemerintah bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam pengembangan sektor wisata.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat desa terutama dalam proses pengembangan sektor wisata.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pariwisata

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 pasal 1 butir 3 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.² Berbeda dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 angka 4 yang menjelaskan tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.³

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan.

Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha

sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya.⁴

Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi Pariwisata, antara lain :

Yoeti mendefinisikan pariwisata:

*“Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi untuk semata-mata menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam”.*⁵

Salah Wahab mengemukakan definisi pariwisata, yaitu :

*“Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi”.*⁶

Menurut A.J. Burkart dan S. Medik :

*“Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu”.*⁷

Dari beberapa pendapat para ahli di atas tentang definisi pariwisata, maka Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan

⁴ Pitana I Gde dan Gayatri Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset diunduh dari <http://fpar.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/2014/03/Jurnal-Pariwisata-Vol.13-No.1-2013.pdf> diakses pada tanggal 14 oktober 2015

⁵ Nyoman S. Pendi, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: Predya Paramita, 2002), h. 1

⁶ Salah Wahab. Manajemen Pariwisata. (PT. Pradya Paramita: 2003), h. 5 diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/10895/5/bab2.pdf> pada tanggal 17 mei 2016

⁷ Oka. A. Yoeti, Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata. (Bandung: PT. Alumni, 2010) h. 56 diakses pada tanggal 17 mei 2016

dengan perjalanan rekreasi mengunjungi suatu tempat yang bersifat sementara.

a. Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan suatu usaha industri yang perlu dikembangkan, sejalan dengan besarnya pendapatan atau devisa Negara yang diperoleh dari sektor ini. Pendapat ini apabila kita pelajari lebih jauh tentang Inpres No 9 Tahun 1969 pasal 3. Adapun isinya adalah sebagai berikut : “Usaha Pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”.⁸

Menurut Inpres Nomor 9 tahun 1969, tujuan dari pengembangan pariwisata dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya serta perluasan lapangan industri lainnya.
- 2) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia
- 3) Meningkatkan persaudaraan dan persahabatan Nasional dan Internasional.

Pengembangan pariwisata di daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan perkeonomian suatu daerah atau Negara.

⁸ *Kamus Istilah Pariwisata* 2003 Bandung Anekasa

Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Alasan pengembangan pariwisata tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoety , yaitu :

“Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak”.⁹

Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan atau menikmati keindahan alam dan termasuk didalamnya cagar alam, kebun raya, tempat bersejarah dan candi-candi, benda-bangunan kuno, perkebunan dan sawah ladang.

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan :

a. Pengembangan obyek-obyek wisata

Pengembangan obyek wisata ini dapat dilakukan pada dua segi, yaitu :

1) Dari segi fisik

- a) Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi obyek wisata.
- b) Melengkapi sarana dan prasarana wisata yang sudah ada di lokasi wisata.

⁹ A Oka Yoetjie. 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

2) Dari segi non fisik

- a) Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.
- b) Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
- c) Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah seperti makanan dan kerajinan khas.

b. Promosi

Disamping melalui pengembangan obyek wisata, dalam pengembangan kepariwisataan pemerintah daerah juga perlu melakukan promosi-promosi tentang pariwisata yang ada di daerahnya. Dengan adanya promosi, maka orang-orang atau masyarakat luas akan mengetahui dengan jelas tentang obyek-obyek wisata yang ada pada suatu daerah atau Negara, juga tentang kelebihan-kelebihan suatu daerah.

c. Wisatawan

Adalah Pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya.

1) Ciri-ciri Wisatawan

- a) Perjalanan dilakukan lebih dari 24 jam
- b) Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu

c) Orang yang melakukannya tidak mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjunginya.

2) Jenis dan Macam Wisatawan :¹⁰

- a) Wisatawan asing adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki negara lain yang bukan merupakan negara dimana dia tinggal.
- b) *Domestic foreign tourist* adalah orang asing yang berdiam pada suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana dia tinggal
- c) *Domestic tourist* adalah orang yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan.
- d) *Transit tourist* adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu, yang menumpang kapal udara atau laut atau kereta api, yang terpaksa singgah ke suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.
- e) *Business tourist* adalah orang yang melakukan perjalanan wisata setelah tujuan utamanya selesai.

¹⁰ A Oka Yoetie, 1991. *Pengantar Ilmu Pariwisata* Bandung: Anekasa halaman 143-145

d. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata

Menurut garis besar, obyek wisata dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan/atau aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah/tempat tertentu.

Sedangkan pengertian Obyek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1979 ,tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan pada Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut :

Obyek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan termuat satu keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata bagi wisatawan untuk dikunjungi.¹¹

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan,berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan pada Daerah Tingkat I

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan¹².

Tabel 1.1
Level/Dimensi Psikologis Struktural

Level/Dimensi	Psikologis	Struktural
Personal	mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu.	membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya
Masyarakat	menumbuhkan rasa memiliki, gotong-royong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat.	mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. ¹³

Sumber: <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal-Ace-Lingga-Sari-080565201001-IP-2013.pdf>

¹² Prof.Dr.Suparno Eko Widodo,M.M. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* .PUSTAKA PELAJAR hal 200

¹³ H. Quinney, L. Gauvin dan A.E. di Wall dalam Agustino. *Perihal Ilmu Pemerintahan Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik* (2007:203) dikutip dari <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Jurnal-Ace-Lingga-Sari-080565201001-IP-2013.pdf> pada tanggal 21

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat.

Menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pemberdayaan , antara lain :¹⁵

- a) Menurut Parsons, et.al. 1994 pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pember-dayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- b) Menurut Suroto Eko (2002) pemberdayaan adalah proses mengembangkan, memandirikan dan menswadayakan.
- c) Robert dan Greene dalam Damanik dan Pattisiana (2009: 93), pemberdayaan adalah suatu proses bagaimana orang semakin cukup

¹⁴ Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kendali dan mempengaruhi peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.

Tahapan pemberdayaan masyarakat ada beberapa , antara lain :¹⁶

- 1) Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Menyiapkan Materi penyuluhan.
 - b. Menyiapkan lapangan/tujuan tempat yang akan dilakukan penyuluhan.
 - c. Melakukan rekrutmen masyarakat yang bersedia dibina
- 2) Pengkajian, meliputi aspek :
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan jenis binaan.
 - b. Mengidentifikasi peluang pekerjaan yang ada di masyarakat.
- 3) Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan, meliputi aspek :
 - a. Musyarwarah dengan warga binaan.
 - b. Memunculkan alternatif kegiatan dari ide warga binaan.

¹⁶ Tatok Madikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung

- 4) Pemformulasian Rencana Aksi, meliputi aspek :
 - a. Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan yang nantinya untuk ditujukan ke instansi terkait.
- 5) Pelaksanaan Program, meliputi aspek :
 - a. Memberikan materi dan pengarahan kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Melakukan bimbingan atau binaan.
 - c. Magang
- 6) Evaluasi, meliputi :
 - a. Mengidentifikasi pencapaian program apakah sesuai dengan tujuan semula.
- 7) Terminasi, meliputi aspek :
 - a. Pemberhentian hubungan dengan warga binaan disertai dengan adanya monitoring.

Tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah :

- a) Mendorong, memotivasi meningkatkan kesadaran akan potensinya, dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- b) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya.
- c) Penyediaan bahan masukan, dan pembukaan akses peluang.

Upaya pokok yang dilakukan agar peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas-fasilitasnya.

Selain tujuan diatas, pemberdayaan juga mempunyai tujuan untuk membentuk individu yang mandiri. Kemandirian itu meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Sedangkan bagi masyarakat sendiri adalah memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup, terciptanya lapangan kerja dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.¹⁷

Menurut Sumaryadi, mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari ¹⁸:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal erlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya akan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.
- 2) Membutuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- 3) Pengembangan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada pemberdayaan yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan

Strategi Pemberdayaan juga penting dalam proses pemberdayaan karena strategi pemberdayaan dapat dilihat dengan sistem sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sehingga di dalamnya terdapat subsistem strategi berpikir, belajar, bekerja dalam mewujudkan keputusan strategis. Menurut Cook dan Macaulay (2006) strategi pemberdayaan SDM didasarkan atas delapan langkah menuju keberhasilan, yaitu :¹⁹

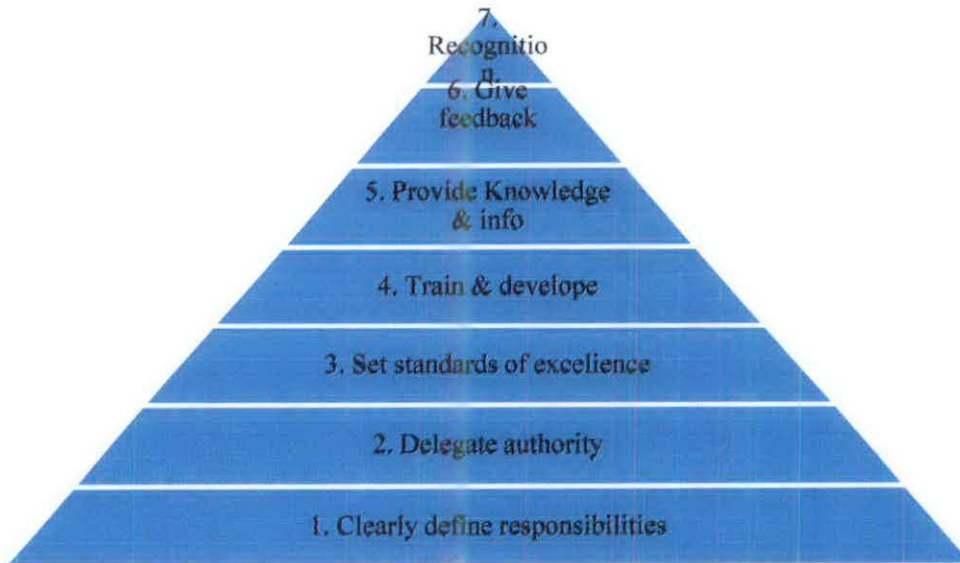
- a. Hubungan dengan Visi
- b. Diarahkan dengan contoh-contoh
- c. Berkomunikasi secara efektif
- d. Meninjau struktur organisasi
- e. Menguatkan kerja tim
- f. Mendorong pengembangan pribadi
- g. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus
- h. Ukur perkembangan yang terjadi dan kenali serta hargaai keberhasilan

Menurut Tracy, ada 10 prinsip untuk memberdayakan masyarakat atau anggota dalam sebuah organisasi. Prinsip-prinsip itu ia namakan sebagai Piramida Pemberdayaan.²⁰

¹⁹ *Ibid* hal 206

²⁰ *Ibid* hal 210

Gambar 1.1
Power Pyramid



Penjelasan dari kesepuluh prinsip-prinsip pemberdayaan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Rumuskan dengan jelas tanggung jawab anggota / masyarakat masing-masing.
- 2) Berikanlah anggota/masyarakat kewenangan sesuai tanggung jawabnya yang dibebankan kepadanya.
- 3) Tentukan *standar keberhasilan* yang baik itu seperti apa.
- 4) Berikan pelatihan kepada anggota/masyarakat yang memungkinkan mereka dapat memenuhi standar tersebut.
- 5) Berikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan.
- 6) Berikan umpan balik terhadap kinerja anggota/masyarakat.
- 7) Percaya kepada masyarakat/anggota.

- 8) Berikan kesempatan berbuat kepada masyarakat/anggota walaupun kemungkinan dapat gagal.
- 9) Perlakukan masyarakat/anggota dengan baik dan hormat.

3. Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:²¹

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian pemerintah daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah (pemerintah) dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut (masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintah, Pemerintah menggunakan asa desentralisasi,tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 20 ayat(2) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Sementara itu,dalam

²¹ UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2

menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 19 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).²²

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :²³

1) Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2) Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3) Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

²² UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Ryas Rasyid Dalam Muhadan Labolo.2010 halaman 32 diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316283&val=5797&title=PERAN%20Pemerintahan%20Desa%20DALAM%20PEMBERDAYAAN%20Masyarakat%20%28Studi%20di%20Desa%20Tampusu%20Kecamatan%20Remboken%20Kabupaten%20Min>

4. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 , otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Kemudian di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksudkan hak-hak bagi daerah otonom adalah daerah memiliki hak , antara lain :²⁵

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b) Memilih pimpinan daerah.
- c) Mengelola aparatur daerah.
- d) Mengelola kekayaan daerah.
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU nomor 32 tahun 2004 juga menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib berskala provinsi dan berskala kabupaten. Urusan wajib yang menjadi

²⁴ UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5

²⁵ UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 21

kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:²⁶

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e) Penanganan bidang kesehatan.
- f) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
- g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
- j) pengendalian lingkungan hidup.
- k) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
- l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :²⁷

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e) Penanganan bidang kesehatan.
- f) Penyelenggaraan pendidikan.
- g) Penanggulangan masalah sosial.
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j) Pengendalian lingkungan hidup.
- k) Pelayanan pertanahan.
- l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi otonomi daerah, antara lain :

²⁷ UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 14

Ateng Syariffudin “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Syarif Saleh “Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

Kemudian dalam penjelasan tentang definisi otonomi daerah, ada juga pendapat yang mengartikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁸

Dengan adanya definisi tentang otonomi daerah, mengartikan bahwa daerah dapat leluasa dalam mengatur daerahnya sendiri guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:²⁹

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

²⁸ DR.H.Inu Kencana Syafie, M.Si, Sistem Pemerintahan Indonesia hal 64

²⁹ <http://digilib.unila.ac.id/2854/17/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 27 oktober 2015

E. Definisi Konseptual

1. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi mengunjungi suatu tempat yang bersifat sementara.
2. Obyek Wisata merupakan suatu tempat dimana memounyai sesuatu yang dapat dinikmati dari segi keindahan , keunikan atau sebagainya yang dapat menarik pengunjung atau wisatawan.
3. Peran Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena pemerintah daerah harus memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, kemudian pemerintah daerah memberikan bimbingan yang diwujudkan melalui tim penyuluh untuk memberikan pelatihan. Selain adanya instrumen, bimbingan dan pelatihan dari pemerintah daerah, harus adanya pendanaan atau pemberian modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
4. Pemberdayaan adalah suatu pemberian kekuasaan atau kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu agar dapat lebih mandiri dan mampu bangkit dari ketidakberdayaan. Seperti teori yang dijelaskan oleh Tatok Madikantio dan Poerwoko Soebianto bahwa dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan antara lain yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program dan kegiatan, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program, evaluasi dan terminasi.

5. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang suatu daeah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.³⁰

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian itu, perlu adanya strategi seperti teori yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto bahwa dalam suatu pemberdayaan masyarakat harus melalui tahapan-tahapan.

Antara lain :

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Menyiapkan Materi penyuluhan.
 - b. Menyiapkan lapangan/tujuan tempat yang akan dilakukan penyuluhan.
 - c. Melakukan rekrutmen masyrakat yang bersedia dibina.

³⁰ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi. Metode penelitian survey. LP3EWS. Jakarta. 1989.

2. Pengkajian, meliputi aspek :
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan jenis binaan.
 - b. Mengidentifikasi peluang pekerjaan yang ada di masyarakat.
3. Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan, meliputi aspek :
 - a. Musyarwarah dengan warga binaan.
 - b. Memunculkan alternatif kegiatan dari ide warga binaan.
4. Pemformulasian Rencana Aksi, meliputi asepek :
 - a. Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan yang nantinya untuk ditujukan ke instansi terkait.
5. Pelaksanaan Program, meliputi aspek :
 - a. Memberikan materi dan pengarahan kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Melakukan bimbingan atau binaan.
6. Evaluasi, meliputi :
 - a. Mengidentifikasi pencapaian program apakah sesuai dengan tujuan semula.
7. Terminasi, meliputi aspek :
 - a. Pemberhentian hubungan dengan warga binaan disertai dngan adanya monitoring.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya, maka diperlukan suatu penelitian dengan metode yang benar dan tepat.

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³¹

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah menekankan pada proses dan makna, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sungai Serayu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banjaregara karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai peran sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan wisata sungai Serayu di Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara selain pihak swasta dan masyarakat sekitar.

3. Unit Analisis Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan unit analisis pada pihak yang terkait, dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1994 hal 06.

pihak antara lain, Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banjarnegara, pengurus organisasi swasta yang ikut dalam pengelolaan dan pengembangan wisata sungai Serayu dan masyarakat Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara

4. Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung meliputi :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara/interview dengan Kabid Pariwisata yaitu Bapak Winarso ST.MT, manajer Serayu Adventure dan perwakilan dari masyarakat Desa Singomerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen-dokumen dari pihak terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Perundang-undangan, jumlah penduduk dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, antara lain :

a. Observasi

Peneliti melakukan Observasi yaitu pengamatan secara langsung di Sungai Serayu tetapi hanya mengamati dari segi pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta atau pengurus wisata Sungai Serayu.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yaitu dengan Kabid Pariwisata , pihak swasta dan masyarakat Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang akan diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan dan jawaban-jawaban narasumber dicatat ataupun direkam dengan alat perekam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada berupa laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh data dari studi lapangan, yang kemudian dilakukan proses penganalisan berdasarkan kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan fakta data-data untuk menghasilkan suatu teori.

Secara umum kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan

- a. Pengumpulan data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.
- b. Mengedit data adalah peneliti memperbaiki kualitas data, seperti hasil wawancara dengan narasumber antara lain Bapak Yusuf Winarsono ST.MT , manajer serayu adventure dan perwakilan dari masyarakat Desa Singomerto yang belum tersusun secara sistematis tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan akan kebenaran yang mungkin timbul setelah membaca data tersebut.
- c. Mengolah data merupakan suatu tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran terkait dengan penerapan tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara kepada masyarakat Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang dapat dipakai sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.³²

³² Wardivanto, Metode Penelitian Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta, Tahun 2006, hal 38